

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
DAN SUMBER DAYA MANUSIA – KELAUTAN
DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PERIKANAN AMBON



LAPORAN KEUANGAN
T A H U N A N
AUDITED

TAHUN ANGGARAN
2025

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antar lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelola keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan berbasis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, 30 April 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

**Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP 19780427 200312 1 001**

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	41
D. Penjelasan atas Pos – Pos Laporan Operasional	52
E. Penjelasan atas Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas	61
F. Pengungkapan Penting Lainnya	64
G. Pengungkapan Capaian Output	65
VI. Lampiran	

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	4
Tabel 2 : Ringkasan Neraca	5
Tabel 3 : Ringkasan Laporan Operasional	6
Tabel 4 : Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas	7
Tabel 5 : Data Pegawai BPPP Ambon	12
Tabel 6 : Penggolongan Kualitas Piutang	23
Tabel 7 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	25
Tabel 8 : Perubahan Pagu Anggaran BPPP Ambon	26
Tabel 9 : Rincian Realisasi Anggaran	28
Tabel 10 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	29
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Pendapatan	30
Tabel 12 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	31
Tabel 13 : Perbandingan Realisasi Belanja	32
Tabel 14 : Perbandingan Belanja Pegawai	33
Tabel 15 : Perbandingan Belanja Barang	34
Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal	35
Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36
Tabel 18 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37
Tabel 19 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Perencanaan & Pengawasan Gedung dan Bangunan	37
Tabel 20 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung	38
Tabel 21 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan & Jembatan	39
Tabel 22 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	39
Tabel 23 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	41
Tabel 24 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	41
Tabel 25 : Piutang Bukan Pajak	42
Tabel 26 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih	43
Tabel 27 : Rincian Persediaan	43
Tabel 28 : Rincian Saldo Tanah	44
Tabel 29 : Rincian Saldo Peralatan dan Mesin	44

Tabel 30	: Rincian Saldo Gedung dan Bangunan	45
Tabel 31	: Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan	46
Tabel 32	: Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya	46
Tabel 33	: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	47
Tabel 34	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	47
Tabel 35	: Rincian Properti Investasi	48
Tabel 36	: Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	48
Tabel 37	: Rincian Aset Lain-lain	49
Tabel 38	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	49
Tabel 39	: Rincian Utang Pihak Ketiga	50
Tabel 40	: Rincian Utang yang belum Ditagihkan	50
Tabel 41	: Rincian Uang Muka dari KPPN	50
Tabel 42	: Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	51
Tabel 43	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	52
Tabel 44	: Rincian Beban Pegawai	54
Tabel 45	: Rincian Beban Persediaan	55
Tabel 46	: Rincian Beban Barang dan Jasa	55
Tabel 47	: Rincian Beban Pemeliharaan	56
Tabel 48	: Rincian Beban Perjalanan Dinas	57
Tabel 49	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	58
Tabel 50	: Rincian Kegiatan Non Operasional	59
Tabel 51	: Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	63



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

JALAN MARTHA ALFONS, POKA, TELUK AMBON KODE POS 97233

TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711)

LAMAN Website : www.bp3ambon-kkp.org, Email : bp3pp_ambon@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Akuntansi Tingkat Satker selaku UAKPA yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 30 April 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abubakar, S.St.Pi, M.Si

NIP 19780427 200312 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahunan - TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari sampai 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan periode 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp778.364.570,00 atau mencapai 95,06 persen dari estimasi pendapatannya senilai Rp818.828.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan periode 31 Desember 2025 adalah senilai Rp50.776.135.766,00 atau mencapai 97,92 persen dari alokasi anggaran senilai Rp51.852.203.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Periode 31 Desember 2025.

Nilai Aset Periode 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan senilai Rp53.846.393.259,00 yang terdiri dari : Aset Lancar senilai Rp20.678.550,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) senilai Rp53.655.166.509,00; Properti Investasi (neto setelah akumulasi penyusutan) senilai Rp170.548.200,00 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) senilai Rp0,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji senilai Rp30.805.484,00 merupakan merupakan Kewajiban Jangka Pendek berupa : Utang kepada Pihak Ketiga Rp30.805.484,00 dan Uang Muka dari KPPN (Sisa Tambahan Uang Persediaan) Rp0,00.

Nilai Ekuitas Dana disajikan senilai Rp53.815.587.775,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan/LO, beban, Surplus/Defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan – LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah senilai Rp778.364.541,00; Jumlah beban adalah senilai Rp52.323.993.907,00 sehingga terdapat surplus/defisit dari kegiatan operasional senilai Rp(51.545.629.366,00); surplus dari kegiatan non operasional lainnya Rp11.086.029,00 dan entitas mengalami defisit – LO senilai Rp(51.534.543.337,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada awal Tahun 2025 senilai Rp55.334.451.791,00 dikurangi defisit – LO senilai Rp(51.534.543.337,00). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi senilai Rp17.908.125,00; Transaksi antar entitas Rp49.997.771.196,00 dengan Kenaikan Ekuitas Rp(1.518.864.016,00). Sehingga Ekuitas Entitas pada periode 31 Desember 2025 adalah senilai Rp53.815.587.775,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 - Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% thd Angg	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	818.828.000	778.364.570	95,06	3.091.312.106
Jumlah Pendapatan		818.828.000	778.364.570	95,06	3.091.312.106
B. BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	45.998.403.000	45.460.952.118	98,83	45.435.195.620
Belanja Barang	B.2.2	5.783.800.000	5.315.183.648	91,90	17.580.190.606
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasional		51.782.203.000	50.776.135.766	98,06	63.015.386.226
Belanja Modal	B.2.3				
Belanja Tanah	B.2.3.1	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3.2	70.000.000	-	0,00	596.852.550
Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.3.3	-	-	0,00	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	B.2.3.4	-	-	0,00	149.714.000
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	B.2.3.4	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Modal		70.000.000	-	0,00	746.566.550
JUMLAH BELANJA		51.852.203.000	50.776.135.766	97,92	63.761.952.776

II. NERACA

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 (Audited)

(dalam Rp)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.3	1.428.485.977	1.428.485.977
Penyisihan Piutang Tdk Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.4	-1428485977	-1428485977
Persediaan	C.5	20.678.550	128.621.500
Jumlah Aset Lancar		20.678.550	128.621.500
ASET TETAP			
Tanah	C.6	30.850.343.000	30.850.343.000
Peralatan dan Mesin	C.7	126.055.680.217	126.044.594.217
Gedung dan Bangunan	C.8	23.423.281.969	23.423.281.969
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.9	8.032.905.962	8.032.905.962
Aset Tetap Lainnya	C.10	155.769.275	155.769.275
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	-134.862.813.914	-133.436.031.177
Jumlah Aset Tetap		53.655.166.509	55.070.863.246
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.12	189.498.000	189.498.000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.13	-18.949.800	-15.159.840
Jumlah Properti Investasi		170.548.200	174.338.160
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.14	237.928.680	237.928.680
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-lain	C.15	-237.928.680	-237.928.680
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		53.846.393.259	55.373.822.906
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	30.805.484	39.371.115
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		30.805.484	39.371.115
JUMLAH KEWAJIBAN		30.805.484	39.371.115
EKUITAS			
Ekuitas	C.17	53.815.587.775	55.334.451.791
JUMLAH EKUITAS		53.815.587.775	55.334.451.791
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		53.846.393.259	55.373.822.906

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Audited)

(dalam Rp)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	778.364.541	3.054.213.863
JUMLAH PENDAPATAN		778.364.541	3.054.213.863
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	45.460.952.118	45.435.195.620
Beban Persediaan	D.3	130.134.950	410.662.700
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.713.502.817	11.348.505.234
Beban Pemeliharaan	D.5	526.484.768	2.735.544.136
Beban Perjalanan Dinas	D.6	44.438.432	3.043.568.061
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.448.480.822	1.610.493.983
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	0	0
JUMLAH BEBAN		52.323.993.907	64.583.969.734
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-51.545.629.366	-61.529.755.871
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
<i>Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non Lancar :</i>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	825.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	0	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset			
JUMLAH SURPLUS / DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	825.000
<i>Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya :</i>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		11.086.029	36.273.243
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON C	D.10	11.086.029	37.098.243
POS LUAR BIASA	D.11		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
SURPLUS / DEFISIT LO	D.12	-51.534.543.337	-61.492.657.628

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Audited)

(dalam Rp)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	55.334.451.791	55.510.254.295
SURFLUS/ DEFISIT LO	E.2	51.534.543.337	61.492.657.628
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		0	0
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		0	0
LAIN - LAIN			
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		17.908.125	646.214.454
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3		
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.5	17.908.125	646.214.454
KOREKSI ATAS BEBAN	E.6	0	0
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.7	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN		0	0
Jumlah Lain-Lain		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	49.997.771.196	60.670.640.670
DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN		0	0
DITERIMA DARI ENTITAS LAIN		0	0
TRANSFER KELUAR		0	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		-1.518.864.016	-175.802.504
EKUITAS AKHIR	E.9	53.815.587.775	55.334.451.791

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor **PER-42/PB/2015** tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : **222/PMK.05/2016** tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : **225/PMK.05/2016** tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : **104/PMK.05/2017** tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
10. Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-2/PB/PB/2026 Tanggal 07 Januari 2026 Perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 (Unaudited) serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.
11. Surat Kepala BPPSDMKP Nomor : B.114/BRSDM.1/KU330/I/2026 Tanggal 13 Januari 2026 Perihal Penyusunan dan Penyampaian LKKL Tahunan Tahun 2025 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dibawahhi oleh Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Sesuai SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, memiliki tugas dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon kini dikenal juga sebagai Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) bagi Penyuluh Perikanan PNS yang berada di wilayah kerjanya. Hal ini termaktub dalam Surat Keputusan Kepala BRSDM KP Nomor : 68/KEP-BRSDM/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis yang menangani Penyuluhan di Lingkup Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Selama Periode Tahunan - Tahun Anggaran 2025 ini, BPPP Ambon dipercayakan untuk bertanggungjawab menangani 70 Penyuluh Perikanan Bantu sesuai SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 8 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022 tentang Pengangkatan Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2025. Sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka BPPP Ambon sepenuhnya menangani administrasi Penyuluh Perikanan yang tersebar di 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

A.2.1.1 VISI

Visi adalah cara pandang jarak jauh kedepan tentang kemana organisasi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”***.

A.2.1.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memiliki misi yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan organisasi, sehingga dapat terus eksis dan mengikuti perubahan zaman.

Misi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon adalah menjalankan misi Presiden, KKP, BRSDM dan Puslatluh KP dalam bidang Kelautan dan Perikanan. Adapun dari 9 misi Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung 4 misi yaitu :

1. Misi I → Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Misi II → Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi sector Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Misi IV → Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Misi VIII → Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

A.2.1.3 Tujuan & Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun Tujuan dan sasaran BPPP Ambon adalah :

1. Meningkatkan Sistem Pelatihan dan Penyuluhan yang memenuhi standar kualifikasi SDM Regional, Nasional dan Internasional
2. Meningkatkan Sistem Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Meningkatkan interkoneksi antar stakeholder dan antar berbagai instansi terkait wilayah kerja BPPP Ambon
4. Meningkatkan kerjasama dan kualitas penyelenggaraan administrasi dan manajemen pelatihan dan penyuluhan BPPP Ambon.

A.2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Unit ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Adapun fungsi Balai pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon adalah :

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- 2) Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- 3) Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- 4) Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- 5) Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- 6) Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- 7) Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 8) Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta
- 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia.

Susunan Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri.

- **Subbagian Umum** dengan tugasnya melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kersipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik Negara dan perlengkapan, serta pelaporan parasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan.

- **Kelompok Jabatan Fungsional** (dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon pada awal Tahun 2025 didukung oleh 45 Orang Pegawai di Balai; 26 PPNPN; 241 Pegawai Penyuluh Perikanan; 17 PPPK Penyuluh ; dan 85 Penyuluh Perikanan Bantu.

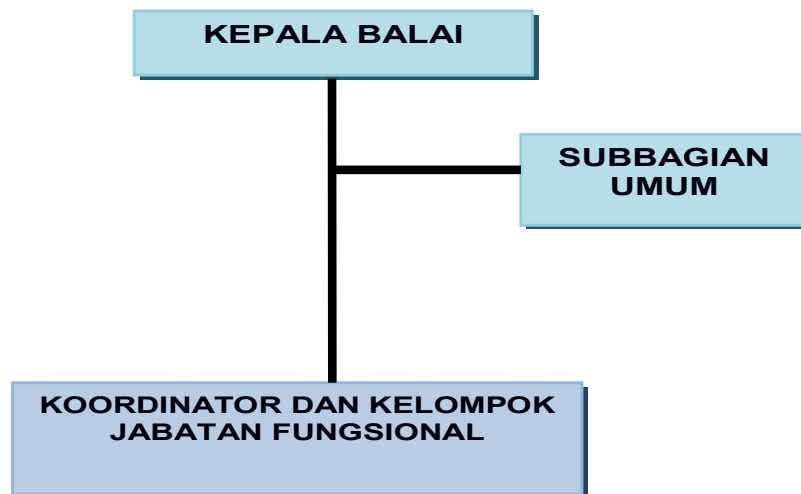
Data Pegawai tersaji dalam tabel 5 berikut :

Tabel 5
Data Pegawai BPPP Ambon

Data	Σ Pegawai Aktif Awal Tahun 2025	Data s.d. 30 Juni 2022			Σ Pegawai Aktif s.d. 31 Desember 2025	Keterangan
		Pensiun	Meninggal	Tidak aktif/ Pindah		
PNS Balai	45	3	-	2	40	Sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 40
PPNPN Balai	26	-	-	7	19	Masih Aktif (18 tenaga teknis, 1 Dokter, 1 Perawat; 7 orang pengangkatan PPPK)
Penyuluh	234	4	2	-	238	Awal Tahun Penyuluh 234 Orang pensiun 2 penyuluh, dan meninggal 2 orang
PPPK Penyuluh	75	-	-	-	75	Ada penambahan PPPK di bulan Oktober 2025 dan masih aktif semuanya
PPPK PNS	7	-	-	-	7	Ada penambahan PPPK di bulan Oktober 2025 dan masih aktif semuanya
Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)	9	-	-	76	70	Sampai Desember 2025 ada 76 PPB yang di angkat menjadi PPPK tertanggal 1 Oktober 2025
Total	414	4	1	17	492	

Berdasarkan tabel 5 diatas, Data Pegawai Aktif BPPP Ambon terdiri atas : Jabatan Pejabat Struktural dan Pelaksana sebanyak 26 Orang Pegawai dan Jabatan Fungsional sebanyak 297 Orang Pegawai, yaitu : 3 Widyaiswara, 13 Instruktur, 234 Penyuluh Perikanan, dan 75 PPPK Penyuluh; 7 PPPK PNS serta dibantu oleh 19 Orang PPNPN (18 Orang Tenaga Teknis, 1 Orang Dokter, 1 Orang Perawat) dan 9 Penyuluh Perikanan Bantu.

Berikut ini tersaji *Struktur Organisasi Balai*.



Dukungan sumberdaya manusia (SDM) pada kegiatan-kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Balai pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon, dapat dilihat sebagai berikut :

➤ **Menurut Golongan**

Untuk 40 Pegawai Balai, terdiri atas :

Golongan IV/c 1 orang; Golongan IV/b sebanyak 1 Orang; Golongan IV/a sebanyak 5 Orang; Golongan III/d sebanyak 7 Orang; Golongan III/c sebanyak 5 Orang; Golongan III/b sebanyak 11 Orang; Golongan III/a sebanyak 7 Orang; Golongan II/d sebanyak 2 Orang; Golongan II/c sebanyak 2 Orang .

Untuk 228 Penyuluh Perikanan, terdiri atas :

Golongan IV/c sebanyak 1 Orang; Golongan IV/b sebanyak 4 Orang; Golongan IV/a sebanyak 13 Orang; Golongan III/d sebanyak 48 Orang; Golongan III/c sebanyak 17 Orang; Golongan III/b sebanyak 32 Orang; Golongan III/a sebanyak 37 Orang; Golongan II/d sebanyak 23 Orang; Golongan II/c sebanyak 29 Orang; Golongan II/b sebanyak 15 Orang dan

Golongan II/a sebanyak 11 Orang.

➤ **Menurut Jenjang Jabatan**

Jenjang Jabatan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu :

- Eselon III sebanyak 1 Orang
- Eselon IV sebanyak 1 Orang
- Jabatan Fungsional Tertentu 295 Orang, terdiri atas :
 - a. Instruktur sebanyak 14 Orang
 - b. Widyaiswara sebanyak 2 Orang
 - c. Penyuluh Perikanan sebanyak 251 Orang
 - d. Fungsional Lainnya sebanyak 2
- Jabatan Fungsional Umum sebanyak 26 Orang

➤ **Menurut Jenjang Pendidikan**

Untuk 40 Pegawai Balai, terdiri atas :

Jenjang Pendidikan S2 sebanyak 15 Orang; S1 sebanyak 11 Orang; D-IV sebanyak 2 Orang; D-III sebanyak 4 Orang; dan SLTA sebanyak 12 Orang.

Untuk 228 Penyuluh Perikanan, terdiri atas :

Jenjang Pendidikan S2 sebanyak 5 Orang; S1 sebanyak 129 Orang; D-IV sebanyak 21 Orang; D-III sebanyak 54 Orang dan SLTA/SUPM sebanyak 73 Orang.

BPPP Ambon didirikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga.

Melalui peran tersebut diharapkan kualitas Laporan K/L dapat ditingkatkan

dan pada akhirnya dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, BPPP Ambon berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan Negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang berkualitas.**

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Periode Tahunan - Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3.1 Basis Akuntansi

Satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon (238755) menerapkan basis akrual dalam Penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrua adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah Basis akuntansi yang mengakui adanya transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.3.2 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar Pengukuran yang diterapkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumberdaya Ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumberdaya ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.3.3 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode Tahunan - Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standard Akutansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akutansi merupakan prinsip - prinsip, dasar - dasar, konvensi - konvensi, aturan - aturan, dan praktik - praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akutansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Ambon. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah - kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan - kebijakan Akuntansi yang penting dan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan - LRA

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan - LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan - LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan-LO*

- Pendapatan - LO Adalah hak Pemerintah Pusat yang di akui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan - LO di akui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau pendapatan di realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan - LO pada badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan jasa pelatihan di akui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan sewa gedung di akui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda di akui pada saat di keluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Akuntansi Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

*Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja*

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi / jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

*Kebijakan
Akuntansi atas
Beban*

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban di akui pada saat timbulnya kewajiban ; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

*Kebijakan
Akuntansi atas
Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan/lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6) Kewajiban

*Kebijakan
Akuntansi atas
Kewajiban*

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

*Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana*

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 6
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

*Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan
Aset Tetap*

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian Laporan Keuangan. Pertama, Pos - pos ekuitas dana pada Neraca per 31 Desember 2015 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun - akun Tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian Akuntansi Berbasis Akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-032.12.2.238755/2025 Tanggal 02 Desember 2024, selama Semester II Tahun Anggaran 2025 ini telah mengadakan enam (16) kali Revisi DIPA dari DIPA Awal.

Berikut disajikan Data Pagu Anggaran Awal dan Pagu Anggaran Revisi 1 dalam tabel 8 berikut ini :

Tabel 8
Data Pagu Anggaran BPPP Ambon Tahun 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Setelah Revisi ke-16
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	Rp 818.828.000	Rp 818.828.000
Pendapatan Lain-Lain	Rp -	Rp -
Jumlah Pendapatan	Rp 818.828.000	Rp 818.828.000
Belanja		
Belanja Pegawai	Rp 42.155.340.000	Rp 45.998.403.000
Belanja Barang	Rp 11.423.525.000	Rp 5.783.800.000
Belanja Bansos	Rp -	Rp -
Belanja Modal	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000
Pendapatan Lain - Lain		
Jumlah Belanja	Rp 53.648.865.000	Rp 51.852.203.000

Adapun alasan dilakukannya Revisi DIPA Satker adalah sebagai berikut :

- Revisi I disetujui pada 12 Februari 2025 yaitu Revisi DIPA berupa Kategori Revisi perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan Revisi Halaman III DIPA.
- Revisi II disetujui pada 21 Ferbruari 2025 berupa revisi dja berupa blokir anggaran
- Revisi III disetujui pada 20 Maret 2025 yaitu revisi dja berupa pergeseran blokir pemenuhan honor ppb
- Revisi IV disetujui pada 09 April 2025 yaitu revisi dja berupa pergeseran blokir operasional KP
- Revisi V disetujui pada 23 April 2025 yaitu Revisi kanwil hal 3 dipa dan Revisi Halaman III DIPA.
- Revisi VI disetujui pada 28 Mei 2025 merupakan Kategori Revisi perubahan

atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan Jenis

Revisi pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu program, satu
Satker dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan dimaksud.

- Revisi VII disetujui pada 15 Juli 2025 yaitu revisi dja berupa pergeseran Anggaran Pelatihan
- Revisi VIII di setujui 21 Juli 2025 Pergeseran anggaran dalam kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- Revisi IX di setujui 01 September 2025 revisi DJA pengurangan anggaran blokir
- Revisi X di setujui 18 September 2025 revisi Pergeseran anggaran dalam kegiatan Gaji dan tunjangan untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan Gaji dan tunjangan yang akan minus dan Pergeseran anggaran dalam kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- Revisi XI di setujui 02 Oktober 2025 revisi Pergeseran anggaran dalam kegiatan Gaji dan tunjangan untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan Gaji dan tunjangan yang akan minus; Pergeseran anggaran dalam kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor dan Revisi Halaman III DIPA.
- Revisi XII di setujui 20 Oktober 2025 revisi Pergeseran anggaran dalam kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- Revisi XIII di setujui 19 November 2025 revisi penambahan anggaran belanja pegawai.
- Revisi XIV di setujui 21 November 2025 revisi Pergeseran anggaran dalam kegiatan Gaji dan Tunjangan untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan Gaji dan Tunjangan dan Pergeseran anggaran dalam kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan

Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

- Revisi XV di setujui 09 Desember 2025 revisi Pergeseran anggaran dalam kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- Revisi XVI di setujui 19 Desember 2025 revisi Pergeseran anggaran dalam kegiatan Gaji dan tunjangan untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan Gaji dan tunjangan yang akan minus

Secara rinci *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025* dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 9
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 818.828.000	Rp 778.364.570	95,06
Jumlah Pendapatan	Rp 818.828.000	Rp 778.364.570	95,06
Belanja			
Belanja Pegawai	Rp 45.998.403.000	Rp 45.460.952.118	98,83
Belanja Barang	Rp 5.783.800.000	Rp 5.315.183.648	91,90
Belanja Modal	Rp 70.000.000	Rp -	-
Jumlah Belanja	Rp 51.852.203.000	Rp 50.776.135.766	97,92

B.1 Pendapatan Negara

*Realisasi
Pendapatan Negara
Rp778.364.570,00*

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan Periode 31 Desember 2025 adalah senilai Rp778.364.570,00 atau mencapai 95,06 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp818.828.000,00. Adapun hal yang menyebabkan realisasi Pendapatan negara tidak mencapai 100 persen adalah karena Pagu Anggaran dalam Output ini merupakan Pagu Blokir tetapi secara IKU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah tercapai 100%.

Dasar Hukum Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPP Ambon menggunakan jenis dan tarif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 85 Tahun 2021 yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor : 75 Tahun 2015).

Pendapatan Negara dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon terdiri dari Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan (425112), Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan (425131), Pendapatan sewa peralatan dan mesin (425132), Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi

(425151),Pendapatan Layanan Pendidikan/Pelatihan (425421), Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811),Pendapatan denda lainnya (425839),Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) dan Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dapat dilihat dalam Tabel 10 berikut ini:

*Tabel 10
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	Laporan Tahunan Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan penjualan hasil perikanan	Rp 57.100.000	Rp 18.516.500	32,43
Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan	Rp 95.334.000	Rp 112.159.000	117,65
Pendapatan sewa peralatan dan mesin	Rp -	Rp 395.775.744	-
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai Tusi	Rp 75.994.000	Rp 242.392.962	318,96
Pendapatan Layanan Pendidikan/Pelatihan	Rp 590.400.000	Rp -	-
Pendapatan denda lainnya	Rp -	Rp 9.350.095	-
Pendapaatan Denda Penyelesaian Pemerintah Pelerjaan		Rp 170.240	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		Rp 29	-
Jumlah I	Rp 818.828.000	Rp 778.364.570	95,06

Adapun realisasi Pendapatan di Semester II ini diperoleh dari Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan berupa Penerimaan Sewa Rumah Dinas Pegawai dan Penerimaan dari Penggunaan Sewa Gedung Bangunan oleh Pihak ketiga); Pendapatan sewa peralatan dan mesin berupaya sewa kapal Bawal Putih 3; Pendapatan denda lainnya;Pendapatan penggunaan Sarpras sesuai tusi; serta Penerimaan kembali Belanja Pegawai di TAYL.

Untuk akun pendapatan sewa rumah yang awalnya adalah akun 425131 telah dilakukan koreksi menjadi akun 425151.Koreksi ini lakukan atas Perubahan Kodefikasi Segmen Akun Sewa Rumah Negara (Nota Dinas DJPb Nomor: ND-1033/PB.6/2024 Tgl 20 Desember 2024.

Maka perbandingan Realisasi Pendapatan sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel 11 berikut.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan penjualan hasil perikanan	Rp 18.516.500	Rp 8.000.000	0,00
Pendapatan penjualan peralatan dan mesin	Rp -	Rp 825.000	0,00
Pendapatan Sewa Gedung Bangunan	Rp 112.159.000	Rp 29.769.360	376,76
Pendapatan sewa peralatan dan mesin	Rp 395.775.744	Rp 1.687.944.503	0,00
Pendapatan Pengg. Sarpras Tusi	Rp 242.392.962	Rp 866.740.000	0,00
Pendapatan Layanan Pendidikan/Pelatihan	Rp -	Rp 459.200.000	0,00
Pendapatan Denda lainnya	Rp 9.350.095	Rp 2.560.000	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp 170.240	Rp -	
Penerimaan kembali bel.peg. TAYL	Rp 29	Rp 408	0,00
Penerimaan kembali bel. barang TAYL	Rp -	Rp 36.272.835	0,00
TOTAL I + II	Rp 778.364.570	Rp 3.091.312.106	25,18

Berdasarkan Tabel 11, tersaji perbandingan Realisasi Pendapatan sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mengalami *Penurunan* sebesar *397,15 persen* dibandingkan realisasi pendapatan di Tahun 2024.

Hal ini disebabkan karena :

1. Karena rendahnya sewa peralatan mesin berupa sewa kapal Bawal Putih 3 oleh pihak ketiga);
2. Karena tidak adanya pendapatan layanan/pendidikan dan pelatihan

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja
Negara
Rp50.776.135.766,00

Realisasi belanja sampai dengan Periode 31 Desember 2025 adalah senilai Rp50.776.135.766,00 atau 97,92 persen dari pagu anggaran senilai Rp51.852.203.000,00.

Adapun rincian Anggaran dan realisasi belanja sampai dengan Periode 31 Desember 2025 tersaji pada Tabel 12 berikut ini.

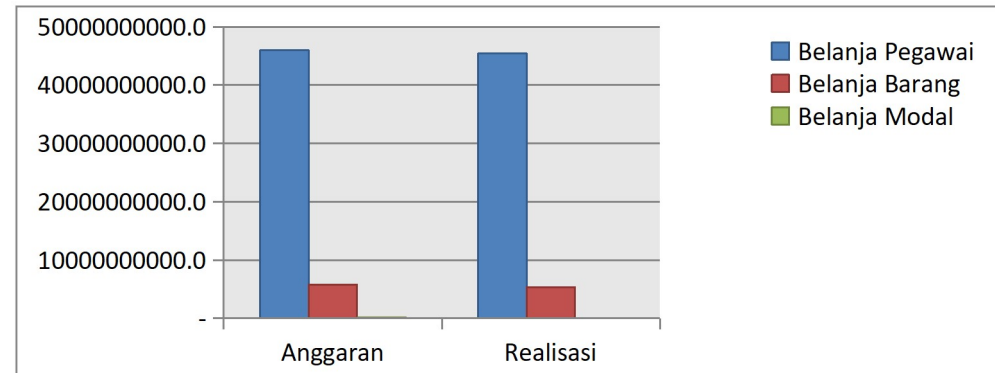
Tabel 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 45.998.403.000	Rp 45.460.952.118	98,83
Belanja Barang	Rp 5.783.800.000	Rp 5.315.183.648	91,9
Belanja Modal	Rp 70.000.000	Rp -	0
Total Belanja Kotor	Rp 51.852.203.000	Rp 50.776.135.766	97,92
Pengembalian Belanja		Rp -	
Belanja Netto	Rp 51.852.203.000	Rp 50.776.135.766	97,92

Berdasarkan Tabel 12, Persentase Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2025 adalah 97,92 persen, merupakan *Persentase Realisasi yang masuk dalam Kategori Cukup Baik*, walaupun diharapkan dapat memenuhi ± 100 Persen.

Adapun hal yang menyebabkan realisasi belanja tidak mencapai 100 persen adalah karena : Ada kelebihan pada Gaji dan Tunjangan Kinerja dan adanya Automatic Adjustment.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan grafik diatas, Belanja Pegawai yang dianggarkan senilai Rp45.998.403.000,00 terealisasi Rp45.460.952.118,00 atau 98,83 persen. Belanja Barang dianggarkan senilai Rp5.783.800.000,00 terealisasi Rp5.315.183.648,00 atau 91,90 persen, sedangkan Belanja Modal dianggarkan senilai Rp70.000.000,00 terealisasi Rp0,00 atau 00,00 persen.

Berikut disajikan pula Perbandingan Realisasi Belanja sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp 45.460.952.118	Rp 45.435.195.620	0,06
Belanja Barang	Rp 5.315.183.648	Rp 17.580.190.606	(69,77)
Belanja Modal	Rp -	Rp 746.566.550	(100,00)
Jumlah Belanja	Rp 50.776.135.766	Rp 63.761.952.776	(20,37)

Berdasarkan Tabel 13, Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) Tahun Anggaran 2025 dan 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja mengalami *Penurunan* sebesar 20,36 persen dibandingkan realisasi belanja Tahun 2024.

- 1. Realisasi Belanja Pegawai mengalami *kenaikan 0,06* persen, karena adanya penambahan PPPK di Tahun ini.
- 2. Pagu Anggaran Barang di Tahun 2025 lebih kecil dari anggaran di Tahun 2024 lalu
- 3. Tidak adanya realisasi belanja Modal di Tahun 2025 karena pagu blokir.

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp45.998.403.000,00

Realisasi Belanja Pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 meliputi : Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Uang Makan PNS dan Tunjangan Kinerja Pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp45.460.952.118,00 dan Rp45.435.195.620,00.

Berikut disajikan Tabel Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 14
Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun)
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 14.056.097.520	Rp 14.369.983.380	(2,18)
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 204.264	Rp 221.862	(7,93)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 949.472.400	Rp 960.578.270	(1,16)
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 301.034.400	Rp 304.579.822	(1,16)
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 19.260.000	Rp 17.640.000	9,18
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 2.343.834.000	Rp 2.418.112.000	(3,07)
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 130.996.401	Rp 131.804.369	(0,61)
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 765.986.340	Rp 782.425.680	(2,10)
Beban Uang Makan PNS	Rp 2.292.926.000	Rp 2.319.340.000	(1,14)
Beban Tunj. Umum PNS	Rp 56.960.000	Rp 55.310.000	2,98
Beban Tunj. Daerah Terpencil PNS	Rp 67.225.000	Rp 70.200.000	(4,24)
Beban Tunj. Khusus Papua PNS	Rp 558.875.000	Rp 576.475.000	(3,05)
Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 1.378.083.500	Rp 1.166.856.800	18,10
Beban Pembulatan Gaji PPPK	Rp 31.977	Rp 25.951	23,22
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	Rp 74.362.110	Rp 67.271.240	10,54
Beban Tunj. Anak PPPK	Rp 19.107.984	Rp 16.609.576	15
Beban Tunj. Fungsional/Umum PPPK	Rp 215.520.000	Rp 188.220.000	14,50
Beban Tunj. Beras PPPK	Rp 70.464.660	Rp 61.122.480	15,28
Beban Uang Makan PPPK	Rp 292.780.000	Rp 189.332.000	54,64
Beban Tunjangan Khusus (Tukin)	Rp 19.951.484.591	Rp 20.267.834.172	(1,56)
Beban Tunjangan Khusus (Tukin) PPPK	Rp 1.916.434.233	Rp 1.471.255.628	30,26
Jumlah Belanja Kotor	Rp 45.461.140.380	Rp 45.435.198.230	0,06
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp (188.262)	Rp (2.610)	-
Jumlah Belanja Bersih	Rp 45.460.952.118	Rp 45.435.195.620	0,06

Berdasarkan Tabel 14, Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan Periode 31 Desember 2025 mengalami *Kenaikan* sebesar *0,06* persen dari realisasi

belanja pegawai periode 31 Desember 2024.

Hal ini disebabkan karena Pada Tahun 2024 ini, BPPP Ambon mendapat tambahan 65 Pegawai PPPK.

Pada Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan Periode 31 Desember 2025 ini ada pengembalian Belanja Pegawai senilai Rp188.262,00 yaitu berupa pengembalian belanja pembulatan gaji PNS senilai Rp562,00; Pengembalian tunjangan umum PNS senilai Rp185.000,00 dan pengembalian pembulatan gaji PPPK senilai Rp2.700,00.

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp5.315.183.648,00

Realisasi Belanja Barang sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp5.315.183.648,00 dan Rp17.580.190.606,00.

Berikut disajikan Tabel Perbandingan Belanja Barang Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut :

Tabel 15
Perbandingan Belanja Barang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/(Turun)
Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 384.892.708	Rp 758.069.975	Rp (373.177.267)
Belanja Pengiriman Surat Pos Pusat	Rp -	Rp 958.000	Rp (958.000)
Bel.Honor Operasional Satker	Rp 117.520.000	Rp 105.024.000	Rp 12.496.000
Bel.Barang Operasional Lainnya	Rp 593.910.367	Rp 982.313.151	Rp (388.402.784)
Bel.Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp -	-
Belanja Bahan	Rp 89.659.056	Rp 2.182.057.939	Rp (2.092.398.883)
Honor Terkait Output Kegiatan	Rp 1.763.800.000	Rp 2.904.200.000	Rp (1.140.400.000)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp 34.098.264	Rp 2.362.902.289	Rp (2.328.804.025)
Belanja Peralatan dan mesin-ekstrakomtable	Rp -	Rp 60.547.710	Rp (60.547.710)
Belanja Barang Persediaan brg konsumsi	Rp 22.192.000	Rp 443.803.600	Rp (421.611.600)
Belanja Langganan Listrik	Rp 365.586.933	Rp 515.789.694	Rp (150.202.761)
Belanja Langganan Telepon	Rp -	Rp -	-
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp 190.146.000	Rp 198.113.700	Rp (7.967.700)
Belanja Sewa	Rp -	Rp 146.740.000	Rp (146.740.000)
Bel. Jasa Profesi	Rp 32.340.000	Rp 237.340.000	Rp (205.000.000)
Bel. Jasa Lainnya	Rp 1.150.115.120	Rp 920.178.351	Rp 229.936.769
Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 120.483.750	Rp 1.507.123.500	Rp (1.386.639.750)
Bel.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 298.130.840	Rp 957.852.036	Rp (659.721.196)
Bel. Biaya Pemeliharaan Irigasi	Rp -	Rp -	-
Bel. Biaya Pemeliharaan Jaringan	Rp 107.870.178	Rp 270.568.600	Rp (162.698.422)
Bel. Perjalanan Biasa	Rp 44.438.432	Rp 1.792.277.185	Rp (1.747.838.753)
Perjalanan dinas dalam kota	Rp -	Rp 28.900.000	Rp (28.900.000)
Bel.Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	Rp -	Rp 13.800.000	Rp (13.800.000)
Bel.Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar kota	Rp -	Rp 1.223.996.822	Rp (1.223.996.822)
Jumlah Belanja Bruto	Rp 5.315.183.648	Rp 17.612.556.552	Rp (12.297.372.904)
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp (32.365.946)	Rp 32.365.946
Jumlah Belanja Neto	Rp 5.315.183.648	Rp 17.580.190.606	Rp (12.265.006.958)

Berdasarkan Tabel 15, Realisasi Belanja Barang sampai dengan Periode 31 Desember 2025 mengalami *penurunan* senilai Rp12.265.006.958,00 atau 330,75 persen dari Realisasi Belanja Barang di Periode 31 Desember 2024.

Hal ini disebabkan karena : Adanya efisiensi anggaran di Tahun 2025 dan Automatic Adjustment pada belanja bahan pada kegiatan pelatihan maupun kegiatan penyuluhan dan operasional perkantoran terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

Belanja Modal
Rp0,00

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp746.566.550,00.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dibuat dengan tepat dan memberikan manfaat pada periode tertentu.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Tahunan Tahun 2025 memiliki Belanja Modal tetapi tidak direalisasikan karena merupakan Automatic Adjustment meliputi: Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Berikut disajikan perbandingan realisasi Belanja Modal sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 dalam tabel berikut :

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 596.852.550	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Belanja Modal Perencanaan & Pengawasan Gedung	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 149.714.000	(100,00)
Belanja Modal Penambahan Nilai Jln dan Jembatan	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	Rp -	Rp 746.566.550	(100,00)
Pengembalian Belanja Modal	Rp -	Rp -	
Jumlah Belanja Bersih	Rp -	Rp 746.566.550	(100,00)

Berdasarkan tabel 16 diatas, realisasi Belanja Modal Tahunan Tahun 2025 mengalami *penurunan* 100,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024, Pekerjaan Belanja Modal untuk Tahun 2025 ini tidak ada

realisasi

B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak mengalami realisasi.

B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp596.852.550,00.

Berikut disajikan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2025	TA. 2024	%
Pelayanan Publik	Rp -	Rp 196.865.160	0,00
Paket Pekerjaan pengadaan barang Sarana Pendingin Rungan dan Perkantoran	Rp -	Rp 199.988.700	0,00
Sarana Budidaya	Rp -	Rp 199.998.690	
Jumlah Belanja Kotor	Rp -	Rp 596.852.550	-
Pengembalian	Rp -	Rp -	
Jumlah Belanja Bersih	Rp -	Rp 596.852.550	-

Berdasarkan Tabel 17, Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan Periode 31 Desember 2025 ini mengalami *penurunan 100,00 persen* bila dibandingkan dengan Periode 31 Desember 2024.

B.2.3.3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berikut disajikan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam tabel 18 sebagai berikut :

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
Pekerjaan	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah Belanja Kotor	Rp -	Rp -	-
Pengembalian	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja Bersih	Rp -	Rp -	-

Berdasarkan Tabel 18, Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan Periode 31 Desember 2025 tidak mengalami Kenaikan/*Penurunan*

B.2.3.4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Periode Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tahun 2025 tidak ada realisasi Belanja Modal Perencanaan & Pengawasan Gedung dan Bangunan.

Berikut disajikan perbandingan realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Tahunan Tahun 2025 dan 2024 pada tabel berikut :

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Perencanaan dan Pengawasan Gedung TA.2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Tahunan TA 2025	Realisasi Tahunan TA 2024	Naik/Turun (%)
Belanja Modal Tanah	0	0	
Paket Pekerjaan Konstruksi: Perencanaan Renovasi Pelayanan Publik	Rp -	Rp -	-
Paket Pekerjaan Konstruksi: Pengawasan Renovasi Pelayanan Publik	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja Kotor	Rp -	Rp -	-
Pengembalian Bel. Modal	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja Bersih	Rp -	Rp -	-

Berdasarkan Tabel 19, Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Periode Tahunan Tahun 2025 tidak mengalami realisasi.

B.2.3.5. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp149.714.000,00.

Berikut disajikan perbandingan realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 pada tabel berikut :

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan TA.2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	2025	2024	Naik/ Turun (%)
Belanja Modal Tanah	0	0	
Renovasi Pelayanan Publik		0	0,00
Renovasi Gedung Kantor	0	149.714.000	0,00
			0,00
Jumlah Belanja Kotor	Rp -	Rp 149.714.000	(100,00)
Pengembalian Bel. Modal	Rp -	Rp -	
Jumlah Belanja Bersih	Rp -	Rp 149.714.000	(100,00)

Berdasarkan Tabel diatas, Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan pada periode ini mengalami *penurunan* sebesar 100,00 persen dari realisasi Periode 31 Desember 2024.

B.2.3.6. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak mengalami realisasi.

B.2.3.7. Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berikut disajikan perbandingan realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 pada tabel berikut :

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan TA.2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	2025	2024	Naik/Turun (%)
Pekerjaan	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah Belanja Kotor	Rp -	Rp -	-
Pengembalian Bel. Modal	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja Bersih	Rp -	Rp -	-

Berdasarkan Tabel 21, Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan pada periode ini tidak mengalami realisasi.

B.2.3.8. Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berikut disajikan perbandingan realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan

Tahun 2025 dan 2024 pada tabel berikut :

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Penambahan Nilai Jaringan TA.2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	Naik/Turun (%)
Pekerjaan	Rp -	Rp -	0,00
Pekerjaan	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah Belanja Kotor	Rp -	Rp -	-
Pengembalian Bel. Modal	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja Bersih	Rp -	Rp -	-

Berdasarkan Tabel 22, Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan pada periode ini tidak mengalami realisasi.

B.2.3.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Realisasi Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 atau tidak mengalami realisasi.

B.2.4. Belanja Sosial

Belanja Bantuan
Sosial Rp0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tidak memiliki Pagu Anggaran Belanja Bantuan Sosial TA 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 23.

Tabel 23
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	31 Des 2025
1	BTN Cabang Ambon	-
2	Saldo TUP	-
3	Saldo Uang Muka	-
4	Kuitansi UP/TUP	-
Jumlah		-
5	BP Pajak	-
6	LS Bendahara	-
7	Lain-lain	-
8	Selisih Kas	-
Total UP/TUP		-

Berdasarkan Tabel 23 diatas, dapat dijelaskan bahwa : saldo sampai dengan akhir Periode 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas lain yang berada dalam penguasaan bendahara selain uang persediaan. Saldo kas lainnya dan setara kas sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji pada Tabel 24.

Tabel 24
Rincian Kas Lainnya dan Setara kas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Belanja Brg yg msh hrs dbayar	-	-
Utang Pajak yang blm disetor	-	-
TOTAL	-	-

Sesuai Tabel 24 diatas, Saldo kas Lainnya dan Setara Kas Periode 31 Desember 2025 tidak mengalami penambahan saldo.

C.3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak
Rp1.428.485.977,00

Saldo Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Saldo Piutang Bukan Pajak sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp1.428.485.977,00 dan Rp1.428.485.977,00

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan dalam Tabel 25.

Tabel 25
Piutang Bukan Pajak

No	Jenis	31 Des 2025	31 Des 2024
1	Piutang Bukan Pajak	1.428.485.977	1.428.485.977
Jumlah		1.428.485.977	1.428.485.977

Sesuai Tabel 25 diatas, Nilai Piutang Bukan Pajak sebesar Rp.1.428.485.977,00 merupakan koreksi dari BPK Tahun 2023 atas pencatatan piutang yang telah diserahkan pengurusannya ke PUPN namun belum tercatat pada Laporan Keuangan atas PT. Carita Boat Indonesia.

C.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tdk
Tertagih – Piutang Bukan
Pajak
Rp(1.428.485.977,00)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp(1.428.485.977,00) dan Rp(1.428.485.977,00).

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak tersaji dalam Tabel berikut.

*Tabel 26
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang per 31 Des 2025	Nilai Piutang per 31 Des 2024
Lancar		-
Kurang Lancar	-	-
Diragukan	-	-
Macet	(1.428.485.977)	-
TOTAL	(1.428.485.977)	-

Sesuai Tabel 26 diatas, Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 adalah Rp(1.428.485.977,00) merupakan koreksi BPK Tahun 2023 Pencatatan piutang yang telah diserahkan pengurusannya ke PUPN namun belum tercatat pada Laporan Keuangan atas PT. Carita Boat Indonesia

C.5. Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran.

Nilai Persediaan sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah senilai Rp20.678.550,00 dan Rp128.621.500,00.

Rincian Persediaan sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji pada Tabel 27 berikut.

*Tabel 27
Rincian Persediaan*

No	Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	2.785.500	36.262.000
2	Persediaan Lainnya	17.893.050	92.359.500
	Jumlah	20.678.550	128.621.500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Persediaan
Rp20.678.550,00*

C.6. Tanah

Tanah

Rp30.850.343.000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp30.850.343.000,00 atau tidak mengalami mutasi tambah maupun mutasi kurang pada periode ini.

Rincian saldo tanah disajikan pada Tabel 28 berikut.

Tabel 28
Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Luas	Nilai	Nilai
1	1	23.920 M2	30,354,480,000	Jl. Martha Alfons Poka
2	2	256 M2	187,296,000	Jl. Martha Alfons Poka
3	3	850 M2	308,567,000	Jl. Wolter Monginsidi Lateri
Jumlah			30,850,343,000	-

C.7. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp126.055.680.217,00

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp126.055.680.217,00 dan 126.044.594.217,00 atau mengalami mutasi tambah Rp11.086.000,00 atau 0,01 persen pada periode ini.

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 29
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 126.044.594.217
Mutasi Tambah :	
Saldo Awal	Rp -
Pembelian Peralatan mesin BPPP Ambon	Rp -
Perolehan Lainnya (belanja peralatan dan mesin)	Rp 11.086.000
Mutasi Kurang :	
Henti Penggunaan Aset	Rp -
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 126.055.680.217
Akumulasi Penyusutan	Rp (124.788.250.487)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 1.267.429.730

Berdasarkan Tabel diatas, Saldo Peralatan dan Mesin mengalami mutasi tambah yaitu :

- ❖ Terdapat Perolehan lainnya senilai Rp11.086.000,00 terdiri dari Kursi 3 unit senilai Rp8.487.000,00 dan Mesin Cuci 1 unit senilai Rp2.599.000,00 hal ini merupakan belanja Operasional yang dicatat sebagai penambah Nilai Aset Tetap TA 2025.

C.8. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp23.423.281.969,00

Nilai Gedung dan Bangunan periode sampai 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp23.423.281.969,00 atau tidak mengalami mutasi tambah maupun kurang pada periode ini.

Rincian transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan pada Tabel 30 sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2024	23.423.281.969
Mutasi Tambah:	
Saldo awal	-
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-
Koreksi pencatatan nilai bertambah	-
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	23.423.281.969
Akumulasi Penyusutan	(4.812.941.213)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	18.610.340.756

Saldo Gedung dan Bangunan tidak mengalami mutasi tambah dan kurang pada periode 2025

C.9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp8.032.905.962,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp8.032.905.962,00 dan Rp8.032.905.962,00 atau tidak mengalami mutasi tambah dan mutasi kurang dari saldo 31 Desember 2025.

Berikut disajikan dalam Tabel 31 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2024	8.032.905.962
Mutasi tambah:	
Koreksi Pencatatan nilai tambah	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	8.032.905.962
Akumulasi Penyusutan	(5.260.672.214)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.772.233.748

Sesuai Tabel 31 diatas, Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mengalami mutasi tambah maupun kurang pada periode ini.

C.10. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp155.769.275,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp155.769.275,00.

Berikut disajikan Mutasi kurang transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan dalam Tabel 32 sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 155.769.275
Mutasi tambah:	
Normalisasi BMN	Rp -
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 155.769.275
Akumulasi Penyusutan	Rp (950.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 154.819.275

Sesuai tabel 32 diatas, Saldo Aset Tetap Lainnya pada periode ini tidak mengalami mutasi tambah maupun kurang pada periode ini.

C.11. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam
Pengerjaan
Rp0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp0,00 atau tidak mengalami mutasi tambah dan kurang pada periode ini.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	2024
KDP		0
KDP	0	0

Pada periode ini, tidak ada saldo Konstruksi dalam Pengerjaan.

C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(134.862.813.914,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp(134.862.813.914,00) dan Rp(133.436.031.177,00) atau mengalami mutasi kurang Rp(1.426.782.737,00) atau 2,57 persen dari periode sebelumnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 34 berikut.

Tabel 34
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 126.055.680.217	Rp 124.788.250.487	Rp 1.267.429.730
2	Gedung dan Bangunan	Rp 23.423.281.969	Rp 4.812.941.213	Rp 18.610.340.756
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 8.032.905.962	Rp 5.260.672.214	Rp 2.772.233.748
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 155.769.275	Rp 950.000	Rp 154.819.275
	Akumulasi Penyusutan	Rp 157.667.637.423	Rp 134.862.813.914	Rp 22.804.823.509

C.13. Properti Investasi

Properti Investasi
Rp189.498.000.,00

Saldo Properti Investasi sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp189.498.000,00 atau tidak mengalami mutasi tambah/kurang pada periode ini.

Adapun mutasi Properti Invesatsi disajikan dalam sebagai berikut:

*Tabel 35
Rincian properti investasi*

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 189.498.000
Mutasi Tambah:	
Properti Investasi Bangunan Kantin	Rp -
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 189.498.000
Akumulasi Penyusutan	Rp (18.949.800)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 170.548.200

Properti Investasi di tahun 2025 belum ada realisasi yang menghasilkan PNBPN hal ini dikarenakan belum adanya peminat untuk menyewa dan BPPP Ambon telah berupaya dengan cara mempromosikan ke para stockholder saat melakukan kunjungan ke BPPP Ambon ataupun sebaliknya. Selama belum ada peminat gedung itu di pakai untuk mendukung kegiatan pelatihan budidaya dan pengolahan.

C.14. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

*Akum. Penyusutan
Properti investasi
Rp(18.949.800,00)*

Akumulasi Penyusutan Lainnya merupakan kontra Akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian dan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan Lainnya sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(18.949.800,00) dan Rp(15.159.840,00).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada periode ini adalah sebagai berikut :

*Tabel 36
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi properti investasi*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Properti Investasi	189.498.000	18.949.800	170.548.200
Jumlah		189.498.000	18.949.800	170.548.200

C.15. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain
Rp237.928.680,00

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Perkantoran.

Saldo Aset Lain-lain sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp237.928.680,00 atau tidak mengalami penghentian penggunaan aset pada periode ini.

Adapun mutasi aset lain-lain disajikan dalam sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Aset Lain-lain

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 237.928.680
Mutasi Tambah:	
Reklafikasi dari aset tetap ke aset lainnya	Rp -
Mutasi kurang:	
Penghapusan Peralatan mesin dari aset	Rp -
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 237.928.680
Akumulasi Penyusutan	Rp (237.928.680)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp -

C.16. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akum.Peny&Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(237.928.680,00)

Akumulasi Penyusutan Lainnya merupakan kontra Akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian dan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan Lainnya sampai dengan periode 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(237.928.680,00) dan Rp(237.928.680,00).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada periode ini adalah sebagai berikut :

Tabel 38
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain	Rp.237.928.680	Rp.237.928.680	0
Jumlah		Rp.237.928.680	Rp.237.928.680	0

Utang Kepada Pihak
ketiga Rp30.805.484,00

C.17. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp30.805.484,00 dan Rp39.371,115,00.

Rincian Utang kepada Pihak ketiga pada periode ini adalah sebagai berikut :

Tabel 39
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 39.371.115
Pelunasan Beban Listrik dan Telp Des 2024	Rp (39.371.115)
Saldo Per Januari 2025	Rp -
Utang kepada Pihak ketiga	Rp 30.805.484
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 30.805.484

Saldo Utang Pihak ketiga senilai Rp30.805.484,00 merupakan tagihan listrik bulan desember 2025 yang akan di bayarkan bulan Januari 2026.

Utang yang belum
ditagihkan Rp0,00

C.18. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum Ditagihkan sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Utang yang belum Ditagihkan pada periode ini adalah sebagai berikut :

Tabel 40
Rincian Utang yang belum Ditagihkan

Saldo per 31 Desember 2024	Rp -
Utang yang belum Ditagihkan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2025	Rp -

Uang muka dari kppn
Rp0,00

C.19. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN diberikan oleh KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Satker untuk dikelola sebagai Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan.

Uang Muka dari KPPN sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Uang Muka dari KPPN pada periode ini adalah sebagai berikut :

Tabel 41
Rincian Uang Muka dari KPPN

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-
Uang Muka dari KPPN	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-

C.20. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari atau 12 (dua belas) bulan.

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 42
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-

C.19. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp53.815.587.775,00 dan Rp55.334.451.791,00 .

Saldo Ekuitas ini harus memiliki nilai yang sama pada Ekuitas Akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Utang jangka pendek
lainnya
Rp0,00*

*Ekuitas
Rp53.815.587.775,00*

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp778.364.541,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp778.364.541,00 dan Rp3.054.213.863,00.

Pendapatan tersebut disajikan dalam tabel 43 berikut :

Tabel 43
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan hasil perikanan	Rp 18.516.500	Rp 8.000.000	-
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	Rp -	Rp -	-
Pendapatan Sewa Gedung	Rp 112.159.000	Rp 29.769.360	276,76
Pendapatan sewa Peralatan dan mesin	Rp 395.775.744	Rp 1.687.944.503	-
Pendapatan Pengg. Sarpras sesuai dengan tusi	Rp 242.392.962	Rp 866.740.000	(72,03)
Pendapatan Layn. Pend./Pelat.	Rp -	Rp 459.200.000	(100,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp 170.240	Rp -	-
Pendpaatan Denda Lainnya	Rp 9.350.095	Rp 2.560.000	-
Jumlah	Rp 778.364.541	Rp 3.054.213.863	(74,52)

Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak milik BPPP Ambon periode ini senilai Rp778.364.541,00 atau mengalami penurunan senilai 74,52 persen dari periode 31 Desember 2025 berupa :

- ❖ Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan yang merupakan pendapatan-LO senilai Rp112.159.000,00 yang diperoleh dari Penggunaan sewa gedung/bangunan oleh pihak luar balai
- ❖ Pendapatan penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi merupakan pendapatan LO yang diperoleh dari pemanfaatan Workshop Balai senilai Rp242.392.962,00;

- ❖ Pendapatan sewa peralatan dan mesin senilai Rp395.775.744,00 berupa sewa kapal bawal putih III.
- ❖ Pendapatan penjualan hasil perikanan senilai Rp.18.516.500,00.
- ❖ Pendapatan denda lainnya senilai Rp9.350.095,00 merupakan denda keterlambatan pembayaran.
- ❖ Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah senilai Rp170.240,00 merupakan denda akibat terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah terdapat realisasi senilai Rp778.364.570,00 sedangkan pada Laporan Operasional (LO) terdapat realisasi pendapatan senilai Rp778.364.541,00.

Perbedaan nilai pendapatan tersebut disebabkan karena Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah mencatat semua bentuk Pendapatan Penerimaan, sedangkan pada Laporan Operasional tidak mencatat pendapatan atas penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp29,00

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp45.460.952.118,00*

Jumlah Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp45.460.952.118,00 dan Rp45.435.195.620,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai disajikan pada tabel dibawah ini :

*Tabel 44
Rincian Beban Pegawai*

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 14.056.097.520	Rp 14.369.983.380	-2,18
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 203.702	Rp 219.252	-7,09
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 949.472.400	Rp 960.578.270	-1,16
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 301.034.400	Rp 304.579.822	-1,16
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 19.260.000	Rp 17.640.000	9,18
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 2.343.834.000	Rp 2.418.112.000	-3,07
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 130.996.401	Rp 131.804.369	-0,61
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 765.986.340	Rp 782.425.680	-2,1
Beban Uang Makan PNS	Rp 2.292.926.000	Rp 2.319.340.000	-1,14
Beban Tunj. Umum PNS	Rp 56.775.000	Rp 55.310.000	2,65
PNS	Rp 67.225.000	Rp 70.200.000	-4,24
PNS	Rp 558.875.000	Rp 576.475.000	-3,05
Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 1.378.083.500	Rp 1.166.856.800	18,1
Beban Pembulatan Gaji PPPK	Rp 29.277	Rp 25.951	12,82
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	Rp 74.362.110	Rp 67.271.240	10,54
Beban Tunj. Anak PPPK	Rp 19.107.984	Rp 16.609.576	15
Beban Tunj. Fungsional PPPK	Rp 211.680.000	Rp 188.220.000	12,46
Beban Tunj. Beras PPPK	Rp 70.464.660	Rp 61.122.480	15,28
Beban Uang Makan PPPK	Rp 292.780.000	Rp 189.332.000	54,64
PPPK	Rp 3.840.000	Rp 20.267.834.172	-99,98
(Tukin) PPPK	Rp 19.951.484.591	Rp 1.471.255.628	1.256,09
(Tukin)	Rp 1.916.434.233	Rp 20.267.834.172	-90,54
Jumlah Beban Kotor	Rp 45.460.952.118	Rp 45.435.195.620	0,06
Pegawai	Rp	Rp -	
Jumlah Beban Bersih	Rp 45.460.952.118	Rp 45.435.195.620	0,06

Berdasarkan Tabel 44 diatas, Laporan Operasional – Beban Pegawai Periode 31 Desember 2025 mengalami *Kenaikan 0,57 persen* atas beban pegawai di Periode 31 Desember 2027.

Pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Pegawai Rp45.460.952.118,00 sedangkan pada Laporan Operasional (LO) – Beban Pegawai Rp45.460.952.118,00 atau tidak ada selisih pencatatan .

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp130.134.950,00

Jumlah Beban Persediaan pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp130.134.950,00 dan Rp410.662.700,00.

Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 45
Rincian Beban Persediaan

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	Rp 54.007.500	Rp 222.871.200	(75,77)
Beban Persediaan bahan baku	Rp -	Rp -	-
Beban persediaan lainnya	Rp 76.127.450	Rp 187.791.500	(59,46)
Jumlah	Rp 130.134.950	Rp 410.662.700	(68,31)

Berdasarkan Tabel 45 diatas, Laporan Operasional – Beban Persediaan Periode 31 Desember 2025 mengalami realisasi *penurunan* senilai Rp280.527.750,00 atau 68.31 persen atas beban persediaan periode 31 Desember 2024.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp4.713.502.817,00

Jumlah Beban Persediaan pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp4.713.502.817,00 dan Rp11.348.505.234,00 .

Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 46
Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik/(Turun)
Belanja Keperluan Perkantoran	384.892.708	758.069.975	Rp 373.177.267
Belanja Pengiriman Surat Pos Pusat	-	958.000	Rp 958.000
Bel. Honor Operasional Satker	117.520.000	105.024.000	Rp (12.496.000)
Bel. brg operasional lainnya	593.910.367	982.313.151	Rp 388.402.784
Belanja Bahan	89.659.056	2.182.057.939	Rp 2.092.398.883
Honor Terkait Output Kegiatan	1.763.800.000	2.904.200.000	Rp 1.140.400.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	34.098.264	2.345.942.289	Rp 2.311.844.025
Belanja Langganan Listrik	357.021.302	507.020.119	Rp 149.998.817
Belanja Langganan Telepon	-	-	Rp -
Bel. Langganan Daya dan Jasa Lainnya	190.146.000	198.113.700	Rp 7.967.700
Bel. Sewa	-	146.740.000	Rp 146.740.000
Bel. Jasa Profesi	32.340.000	237.340.000	Rp 205.000.000
Bel. Jasa Lainnya	1.150.115.120	920.178.351	Rp (229.936.769)
Beban Aset Ekstrakomtabel Alsin	-	60.547.710	Rp 60.547.710
Jumlah	Rp 4.713.502.817	Rp 11.348.505.234	Rp (6.635.002.417)

Berdasarkan Tabel 46 diatas, Laporan Operasional – Beban Barang dan Jasa Periode 31 Desember 2025 mengalami *penurunan Rp6.635.002.417,00 atau 58,46 persen* atas beban barang dan jasa Periode 31 Desember 2025.

Pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Beban Barang dan Jasa memiliki saldo nilai yang sama dengan Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional (LO) yaitu senilai Rp4.713.502.817,00 atau tidak ada selisih pencatatan.

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp526.484.768,00*

Beban Pemeliharaan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp526.484.768,00 dan Rp2.735.544.136,00.

Beban Pemeliharaan merupakan Beban yang maksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ke kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel 47
Rincian Beban Pemeliharaan*

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik/(Turun)
Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 120.483.750	Rp 1.507.123.500	Rp 1.386.639.750
Bel. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 298.130.840	Rp 957.852.036	Rp 659.721.196
Bel. Pemeliharaan Irigasi	Rp -	Rp -	Rp -
Bel. Biaya Pemeliharaan Jaringan	Rp 107.870.178	Rp 270.568.600	Rp 162.698.422
Bel. Biaya Persediaan Suku Cadang	Rp -	Rp -	Rp -
Beban Aset Ekstra Gedung Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -
Bel. Persediaan untuk pemeliharaan	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Belanja Bruto	Rp 526.484.768	Rp 2.735.544.136	Rp (2.209.059.368)
Jumlah Belanja Neto	Rp 526.484.768	Rp 2.735.544.136	Rp (2.209.059.368)

Berdasarkan Tabel 47 diatas, Laporan Operasional – Beban Pemeliharaan Periode 31 Desember 2025 mengalami *penurunan Rp(2.209.059.568,00) atau 80,75 persen* atas beban pemeliharaan Periode 31 Desember 2024.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas
Rp44.438.432,00*

Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp44.438.432,00 dan Rp3.043.568.061,00.

Beban tersebut adalah merupakan Beban yang terjadi untuk perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel 48
Rincian Beban Perjalanan Dinas*

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik/ (Turun) %
Bel. Perjalanan Biasa	Rp 44.438.432	Rp 1.778.900.632	(97,50)
Bel.Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp -	Rp 28.900.000	-
Bel.Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	Rp -	Rp 13.800.000	(100,00)
Bel.Perjalanan Dinas - P. Pandemi COVID19	Rp -	Rp -	-
Bel.Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar kota	Rp -	Rp 1.221.967.429	(100,00)
Jumlah Belanja Bruto	Rp 44.438.432	Rp 3.043.568.061	(98,54)
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja Neto	Rp 44.438.432	Rp 3.043.568.061	(98,54)

Berdasarkan Tabel 48 diatas, Laporan Operasional – Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember 2024 mengalami *penurunan* senilai Rp(2.999.129.629,00) atau *98,54 persen* atas beban perjalanan dinas Periode 31 Desember 2024.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.448.480.822,00*

Jumlah Beban penyusutan dan Amortisasi untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp1.448.480.822,00 dan Rp1.610.493.983,00.

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat Alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa aset yang bersangkutan. Sedangkan beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat Ekonomi untuk aset tak berwujud.

Rincian beban Penyusutan dan amortisasi Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel 49
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 745.141.638	Rp 907.154.800	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 590.309.708	Rp 592.204.687	
Beban Penyusutan jalan dan Jembatan	Rp 60.882.450	Rp 60.882.450	
Beban Penyusutan Irigasi	Rp 5.647.407	Rp 5.647.407	
Beban Penyusutan Jaringan	Rp 42.709.659	Rp 42.709.659	
Beban peny. Aset tetap yang tidak digunakan	Rp -	Rp-	
Beban penyusutan properti investasi	Rp 3.789.960	Rp 1.894.980	
Jumlah Penyusutan	Rp 1.448.480.822	Rp 1.610.493.983	
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	
Beban Penyusutan Aset lain-lain	Rp -	Rp -	
Jumlah Amortisasi	Rp -	Rp -	
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	Rp 1.448.480.822	Rp 1.610.493.983	

Berdasarkan Tabel 49 diatas, Laporan Operasional – Beban Penyusutan Periode 31 Desember 2025 mengalami *penurunan* senilai Rp(162.013.161,00) atau 10,06 *persen* atas beban perjalanan dinas Periode 31 Desember 2024.

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,00*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

D.9. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

*Beban Pelepasan Aset
Non Lancar Rp0,00*

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban kerugian atas pelepasan aset tanah milik BPPP Ambon yang dihibahkan.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00.

D.10. Kegiatan Non Operasional

*Surplus/ Defisit dari
kegiatan non operasional
Rp11.086.029,00*

Pos Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Pos Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp11.086.029,00 dan Rp37.098.243,00.

Rincian Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional tersebut adalah sebagai berikut :

*Tabel 50
Rincian Kegiatan Non Operasional*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Pengembalian belanja pegawai	Rp -	Rp -	-
Pendapatan Pelepasan Aset	Rp -	Rp 825.000	(100,00)
Pendapatan Keg. Non Operasional Lainnya	Rp 11.086.029	Rp 36.273.243	-
Penjualan alat kantor			
Suplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional	Rp 11.086.029	Rp 37.098.243	(70,12)

Sesuai Tabel 50, Saldo Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya senilai Rp11.086.029,00 merupakan pengadaan Kursi 3 unit senilai Rp8.487.000,00 dan Mesin Cuci 1 unit senilai Rp2.599.000,00 hal ini merupakan belanja Operasional yang dicatat sebagai penambah Nilai Aset Tetap TA 2025 terdiri dari belanja intrakomptabel.

D.11. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa
Rp0,00

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Pos luar biasa Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00.

D.12. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO
Rp51.534.543.337,00

Surplus/Defisit LO Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp(51.534.543.337,00) dan Rp(61.492.657.628,00).

Nilai Surplus/Defisit LO ini harus sama nilainya dengan Surplus/Defisit – LO yang ada pada Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp55.334.451.791,00

Nilai ekuitas pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp55.334.451.791,00 dan Rp55.510.254.295,00.

Ekuitas periode 31 Desember 2025 ini mengalami *penurunan* senilai Rp(175.802.504,00) dari Ekuitas periode 31 Desember 2024.

Nilai ekuitas awal di Tahun 2025 ini harus merupakan nilai yang sama pada ekuitas akhir di Tahun 2024.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp(51.534.543.337,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp(51.534.543.337,00) dan Rp(61.492.657.628,00).

Surplus (Defisit) LO periode 31 Desember 2025 ini mengalami *penurunan* senilai Rp9.958.114.291,00 dari Surplus (Defisit) LO periode 31 Desember 2024

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional dengan surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan
Rp0,00

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp0,00.

E.4. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp(0,00)

Koreksi Atas Reklasifikasi Aset Tetap adalah koreksi atas reklasifikasi aset Tanah. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024

adalah masing-masing senilai Rp(0,00) dan Rp(0,00).

E.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp(17.908.125,00)

Koreksi nilai Perolehan Aset Tetap non Revaluasi merupakan koreksi atas pencatatan kuantitas aset tanah pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp17.908.125,00 dan Rp646.214.454,00 .

Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi asset yang diakibatkan adanya penyusutan amortisasi. Dimana aset yang nilai bukunya sudah nol tidak bisa dilakukan koreksi.

E.6. Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas
Beban Rp0,00

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan yang terjadi pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00.

E.7. Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas
Pendapatan
Rp0,00

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi atas periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

Koreksi atas Pendapatan Periode periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

E.8. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp49.997.771.196,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp49.997.771.196,00 dan Rp60.670.640.670,00.

Transaksi Antar Entitas periode 31 Desember 2024 ini mengalami *penurunan* senilai Rp(10.672.869.474,00) dari Transaksi Antar Entitas periode 31 Desember 2024.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

*Tabel 51
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	50.776.135.766
Diterima dari Entitas Lain	(778.364.570)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Jumlah	49.997.771.196

Berdasarkan tabel 51 diatas, diketahui bahwa transaksi antar entitas – ditagihkan ke entitas lain senilai Rp49.997.771.196,00 merupakan total realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2025; sedangkan transaksi antar entitas – diterima dari entitas lain senilai Rp(778.364.570,00) merupakan total penerimaan pendapatan Negara dan hibah Tahun Anggaran 2025.

E.9. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Rp53.815.587.775,00

Nilai ekuitas pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp53.815.587.775,00 dan Rp55.334.451.791,00.

Ekuitas Akhir periode 31 Desember 2025 ini mengalami *penurunan* senilai Rp(849.949.155,00) dari Ekuitas Akhir periode 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA

❖ BPPP AMBON

- I. Terdapat temuan BPK yaitu Pencatatan piutang yang telah diserahkan pengurusannya ke PUPN namun belum tercatat pada Laporan Keuangan atas PT. Carita Boat Indonesia.
- II. Rekapitulasi Pejabat Perbendaharaan Tahun Anggaran 2025. Satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sesuai ST Kepala Balai Keputusan Selaku Kausa Pengguna Anggaran BPPP Ambon Nomor : KEP.41/MEN/KU.611/2020 Tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (UPT) di Lingkungan KKP

Adapun Formasi Pejabat Perbendaharaan BPPP Ambon adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Abubakar, S.St.Pi, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Rahmawati Umasugi, S.Pi,M.Si
Pejabat Penandatanganan SPM	:	Rachel L. Wattimena,S.Pi,M.Si
Bendahara Pengeluaran	:	Della N. Latuihamallo, A.Md
Bendahara Penerimaan	:	Hartati Rima

F. PENJELASAN ATAS CAPAIAN OUTPUT

Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan. Adapun pengungkapan capaian Rincian Output Per Fungsi sebagai berikut: Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon akan tetapi untuk Tagging Program Prioritas Nasional tidak tercapai ini diakibatkan karena Pagu Anggaran dalam Output ini merupakan Pagu Blokir. Berikut ini adalah Rincian Output menurut klasifikasi fungsi antara lain sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 202

Kementerian/Lembaga	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi	: BPPSDM KP
Satuan Kerja	: Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Fungsi	: Ekonomi
Sub Fungsi	: Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
Program	: Pendidikan dan Pelatihan
Lokasi	: Ambon

Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Periode Tahunan - TA.2025 Audited

No	Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran (Data Sakti)			PN	Keterangan
			Pagu	Realisasi*	%	Target	Realisasi*	Satuan		
	04	EKONOMI	51,852,203,000.00	50,776,324,028.00	97.93%					
	03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	51,852,203,000.00	50,776,324,028.00	97.93%					
	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2,390,539,000.00	1,852,797,556.00	77.51%					
	2375	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	608,724,000.00	72,991,356.00	11.99%					
	RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	70,000,000.00	0.00	0%					
	711	Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	70,000,000.00	0.00	0%	1.0000	1.0000	Unit	PN	Pagu Anggaran dalam Output ini merupakan Pagu Blokir
	SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	538,724,000.00	72,991,356.00	13.55%					
	831	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	538,724,000.00	72,991,356.00	13.55%	712.0000	715.0000	Orang	Non PN	Pagu Anggaran dalam Output ini merupakan Pagu Blokir. Pada periode ini, ada penambahan realisasi volume sebanyak 215 orang dengan Progres 36.27% sehingga akumulasi RVRO menjadi 715 orang dgn PCRO menjadi 100%

Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Periode Tahunan - TA.2025 Audited

	7020	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1,781,815,000.00	1,779,806,200.00	99.89%					
	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1,781,815,000.00	1,779,806,200.00	99.89%					
	646	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	1,781,815,000.00	1,779,806,200.00	99.89%	2,939.0000	2,940.0000	Kelompok Masyarakat	Non PN	Pada Periode ini, terdapat penambahan realisasi VRO 140 kelompok masyarakat yang disuluh dgn PCRO 0.10%, sehingga total RVRO menjadi sebanyak 2939 kelompok dgn PCRO 100%
	646	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	1,781,815,000.00	1,779,806,200.00	99.89%	2,939.0000	2,940.0000	Kelompok Masyarakat	Non PN	dan Penyerapan anggaran 99.89%
	WA	Program Dukungan Manajemen	49,461,664,000.00	48,923,526,472.00	98.91%					
	2378	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	49,461,664,000.00	48,923,526,472.00	98.91%					

Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Periode Tahunan - TA.2025 Audited

	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	49,432,998,000.00	48,895,065,572.00	98.91%					
	962	Layanan Umum	25,887,000.00	25,738,432.00	99.43%	1.0000	1.0000	Layanan	Non PN	Pada Periode ini, Output EBA.962 mengalami realisasi VRO 1 Layanan dengan kenaikan PCRO 8.37% sehingga akumulasi PCRO menjadi 100% dari penyerapan anggaran 99.43%
	994	Layanan Perkantoran	49,407,111,000.00	48,869,327,140.00	98.91%	1.0000	1.0000	Layanan	Non PN	Pada Periode ini, Output EBA.994 mengalami realisasi VRO 1 Layanan dengan kenaikan PCRO 5.44% sehingga akumulasi PCRO menjadi 100% dari penyerapan anggaran 98.91%
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	28,666,000.00	28,460,900.00	99.28%					
	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14,440,000.00	14,359,500.00	99.44%	1.0000	1.0000	Dokumen	Non PN	Pada Periode ini, Output EBD.952 mengalami realisasi VRO 1 dokumen dengan kenaikan PCRO 4% sehingga akumulasi PCRO menjadi 100% dari penyerapan anggaran 99.44%
	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6,746,000.00	6,636,000.00	98.37%	1.0000	1.0000	Dokumen	Non PN	Pada Periode ini, Output EBD.953 mengalami realisasi VRO 1 dokumen dengan kenaikan PCRO 5% sehingga akumulasi PCRO menjadi 100% dari penyerapan anggaran 98.37%

Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Periode Tahunan - TA.2025 Audited

	955	Layanan Manajemen Keuangan	7,480,000.00	7,465,400.00	99.8%	1.0000	1.0000	Dokumen	Non PN	Pada Periode ini, Output EBD.955 mengalami realisasi VRO 1 dokumen dengan kenaikan PCRO 12% sehingga akumulasi PCRO menjadi 100% dari penyerapan anggaran 99.80%
--	-----	----------------------------	--------------	--------------	-------	--------	--------	---------	--------	--

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU
SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 30/04/26 1:51 PM
Tgl Cetak : 30/04/26 4:32 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	778,364,541	3,054,213,863	(2,275,849,322)	(74.515)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	778,364,541	3,054,213,863	(2,275,849,322)	(74.515)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	778,364,541	3,054,213,863	(2,275,849,322)	(74.515)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	45,460,952,118	45,435,195,620	25,756,498	0.057
Beban Persediaan	130,134,950	410,662,700	(280,527,750)	(68.311)
Beban Barang dan Jasa	4,713,502,817	11,348,505,234	(6,635,002,417)	(58.466)
Beban Pemeliharaan	526,484,768	2,735,544,136	(2,209,059,368)	(80.754)
Beban Perjalanan Dinas	44,438,432	3,043,568,061	(2,999,129,629)	(98.54)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU
SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 30/04/26 1:51 PM

Tgl Cetak : 30/04/26 4:32 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,448,480,822	1,610,493,983	(162,013,161)	(10.06)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	52,323,993,907	64,583,969,734	(12,259,975,827)	(18.983)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(51,545,629,366)	(61,529,755,871)	9,984,126,505	(16.227)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	825,000	(825,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	825,000	(825,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11,086,029	36,273,243	(25,187,214)	(69.437)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11,086,029	36,273,243	(25,187,214)	(69.437)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	11,086,029	37,098,243	(26,012,214)	(70.117)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(51,534,543,337)	(61,492,657,628)	9,958,114,291	(16.194)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(51,534,543,337)	(61,492,657,628)	9,958,114,291	(16.194)

Keterangan :
FINAL

Ambon, 30 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
null

Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP 197804272003121001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12

SATUAN KERJA : BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON 238755

Tgl Data : 30/04/26 1:51 PM

Tgl Cetak : 30/04/26 4:34 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	818,828,000	778,364,570	(40,463,430)	95.06	681,984,000	3,091,312,106	2,409,328,106	453.28
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	818,828,000	778,364,570	(40,463,430)	95.06	681,984,000	3,091,312,106	2,409,328,106	453.28
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	818,828,000	778,364,570	(40,463,430)	95.06	681,984,000	3,091,312,106	2,409,328,106	453.28
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	51,852,203,000	50,776,135,766	(1,076,067,234)	97.92	67,167,543,000	63,761,952,776	(3,405,590,224)	94.93
1. Belanja Pegawai	45,998,403,000	45,460,952,118	(537,450,882)	98.83	45,562,340,000	45,435,195,620	(127,144,380)	99.72
2. Belanja Barang	5,783,800,000	5,315,183,648	(468,616,352)	91.90	20,858,311,000	17,580,190,606	(3,278,120,394)	84.28
3. Belanja Modal	70,000,000	0	(70,000,000)	0.00	746,892,000	746,566,550	(325,450)	99.96
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON 238755

Tgl Data : 30/04/26 1:51 PM
Tgl Cetak : 30/04/26 4:34 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	51,852,203,000	50,776,135,766	(1,076,067,234)	97.92	67,167,543,000	63,761,952,776	(3,405,590,224)	94.93
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Ambon, 30 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
null

Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP 197804272003121001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 12 **BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN**
WILAYAH/PROVINSI : 2100 **MALUKU**
SATUAN KERJA : 238755 **BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/26 4:36 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 30/4/26 2:30 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13,435,640,000	14,060,076,000	14,056,097,520	0	14,056,097,520	99.97	3,978,480
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	209,000	209,000	204,264	562	203,702	97.47	5,298
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	865,300,000	949,869,000	949,472,400	0	949,472,400	99.96	396,600
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	306,000,000	301,111,000	301,034,400	0	301,034,400	99.97	76,600
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	17,640,000	19,260,000	19,260,000	0	19,260,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,417,535,000	2,344,393,000	2,343,834,000	0	2,343,834,000	99.98	559,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	122,800,000	131,043,000	130,996,401	0	130,996,401	99.96	46,599
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	685,000,000	766,145,000	765,986,340	0	765,986,340	99.98	158,660
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,647,592,000	2,323,741,000	2,292,926,000	0	2,292,926,000	98.67	30,815,000
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	70,200,000	67,225,000	67,225,000	0	67,225,000	100	0
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	576,900,000	558,880,000	558,875,000	0	558,875,000	100	5,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	52,020,000	56,960,000	56,960,000	185,000	56,775,000	99.68	185,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	19,196,836,000	21,578,912,000	21,542,871,325	185,562	21,542,685,763	99.83	36,226,237
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,100,000,000	1,378,084,000	1,378,083,500	0	1,378,083,500	100	500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	32,000	34,000	31,977	2,700	29,277	86.11	4,723
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	87,000,000	74,365,000	74,362,110	0	74,362,110	100	2,890
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	22,900,000	19,112,000	19,107,984	0	19,107,984	99.98	4,016
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	222,000,000	211,680,000	211,680,000	0	211,680,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	78,000,000	70,466,000	70,464,660	0	70,464,660	100	1,340
511628	Belanja Uang Makan PPPK	293,000,000	304,579,000	292,780,000	0	292,780,000	96.13	11,799,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	1,802,932,000	2,062,160,000	2,050,350,231	2,700	2,050,347,531	99.43	11,812,469
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	19,155,572,000	20,421,961,000	19,951,484,591	0	19,951,484,591	97.7	470,476,409
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,000,000,000	1,935,370,000	1,916,434,233	0	1,916,434,233	99.02	18,935,767
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	21,155,572,000	22,357,331,000	21,867,918,824	0	21,867,918,824	97.81	489,412,176
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	42,155,340,000	45,998,403,000	45,461,140,380	188,262	45,460,952,118	98.83	537,450,882
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	520,561,000	385,101,000	384,892,708	0	384,892,708	99.95	208,292
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	0	0	0	0		0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	108,216,000	117,520,000	117,520,000	0	117,520,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2100
SATUAN KERJA : 238755
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
MALUKU
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/26 4:36 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 30/4/26 2:30 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,826,445,000	593,924,000	593,910,367	0	593,910,367	100	13,633
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,457,622,000	1,096,545,000	1,096,323,075	0	1,096,323,075	99.98	221,925
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,314,638,000	288,261,000	89,659,056	0	89,659,056	31.1	198,601,944
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	454,000,000	1,763,800,000	1,763,800,000	0	1,763,800,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,124,870,000	44,199,000	34,098,264	0	34,098,264	77.15	10,100,736
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,893,508,000	2,096,260,000	1,887,557,320	0	1,887,557,320	90.04	208,702,680
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,000,000	22,200,000	22,192,000	0	22,192,000	99.96	8,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	60,000,000	22,200,000	22,192,000	0	22,192,000	99.96	8,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	492,000,000	365,590,000	365,586,933	0	365,586,933	100	3,067
522112	Belanja Langganan Telepon	1,200,000	0	0	0	0		0
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	192,000,000	190,146,000	190,146,000	0	190,146,000	100	0
522141	Belanja Sewa	80,000,000	0	0	0	0		0
522151	Belanja Jasa Profesi	349,700,000	242,940,000	32,340,000	0	32,340,000	13.31	210,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	932,603,000	1,154,941,000	1,150,115,120	0	1,150,115,120	99.58	4,825,880
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,047,503,000	1,953,617,000	1,738,188,053	0	1,738,188,053	88.97	215,428,947
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	875,979,000	120,484,000	120,483,750	0	120,483,750	100	250
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	903,631,000	298,223,000	298,130,840	0	298,130,840	99.97	92,160
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	235,200,000	107,916,000	107,870,178	0	107,870,178	99.96	45,822
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,014,810,000	526,623,000	526,484,768	0	526,484,768	99.97	138,232
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	466,182,000	88,555,000	44,438,432	0	44,438,432	50.18	44,116,568
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,500,000	0	0	0	0		0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	482,400,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	950,082,000	88,555,000	44,438,432	0	44,438,432	50.18	44,116,568
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	11,423,525,000	5,783,800,000	5,315,183,648	0	5,315,183,648	91.9	468,616,352
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I	: 12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI	: 2100	MALUKU
SATUAN KERJA	: 238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JENIS SATUAN KERJA	: KD	

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 30/04/26 4:36 PM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 30/4/26 2:30 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
	JUMLAH BELANJA	53,648,865,000	51,852,203,000	50,776,324,028	188,262	50,776,135,766	97.92	1,076,067,234

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 12 **BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN**
WILAYAH/PROVINSI : 2100 **MALUKU**
SATUAN KERJA : 238755 **BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 30/04/26 4:37 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	57,100,000	18,516,500	0	18,516,500	32.43
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	95,334,000	112,159,000	0	112,159,000	117.65
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	395,775,744	0	395,775,744	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	75,994,000	242,392,962	0	242,392,962	318.96
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	228,428,000	768,844,206	0	768,844,206	336.58
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	590,400,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	590,400,000	0	0	0	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	170,240	0	170,240	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	9,350,095	0	9,350,095	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	9,520,335	0	9,520,335	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	29	0	29	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	29	0	29	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	818,828,000	778,364,570	0	778,364,570	95.06
	JUMLAH PENDAPATAN	818,828,000	778,364,570	0	778,364,570	95.06

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 30/04/26 1:51 PM

Tgl Cetak : 30/04/26 4:35 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,428,485,977	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	1,428,485,977
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,785,500	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	17,893,050	0
0.0	131111	Tanah	30,850,343,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	126,055,680,217	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	23,423,281,969	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,135,707,710	0
0.0	134112	Irigasi	295,875,000	0
0.0	134113	Jaringan	601,323,252	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	155,769,275	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	124,788,250,487
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	4,812,941,213
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	4,852,615,822
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	107,628,272
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	300,428,120
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	950,000
0.0	138311	Properti Investasi	189,498,000	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	18,949,800
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	237,928,680	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	237,928,680
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	30,805,484
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	50,776,135,766
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	778,364,570	0
0.0	391111	Ekuitas	0	55,334,451,791
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	17,908,125
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	18,516,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	112,159,000
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	395,775,744
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	242,392,962
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	170,240
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	9,350,095
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	29
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	11,086,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	14,056,097,520	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	203,702	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	949,472,400	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 30/04/26 1:51 PM

Tgl Cetak : 30/04/26 4:35 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	301,034,400	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	19,260,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,343,834,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	130,996,401	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	765,986,340	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,292,926,000	0
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	67,225,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	558,875,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	56,775,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,378,083,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	29,277	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	74,362,110	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	19,107,984	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	211,680,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	70,464,660	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	292,780,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	3,840,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	19,951,484,591	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,916,434,233	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	384,892,708	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	117,520,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	593,910,367	0
3.0	521211	Beban Bahan	89,659,056	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,763,800,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	34,098,264	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	357,021,302	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	190,146,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	32,340,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,150,115,120	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120,483,750	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	298,130,840	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	107,870,178	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	44,438,432	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	745,141,638	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	590,309,708	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	60,882,450	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	5,647,407	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	42,709,659	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 30/04/26 1:51 PM

Tgl Cetak : 30/04/26 4:35 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	3,789,960	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	54,007,500	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	76,127,450	0
JUMLAH			243,496,930,107	243,496,930,107

Keterangan :

FINAL

Ambon, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

null

Abubakar, S.St.Pi, M.Si

NIP 197804272003121001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 30/04/26 1:51 PM

Tgl Cetak : 30/04/26 4:24 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	1,428,485,977	1,428,485,977	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1,428,485,977)	(1,428,485,977)	0	0.00
Persediaan	20,678,550	128,621,500	(107,942,950)	(83.92)
JUMLAH ASET LANCAR	20,678,550	128,621,500	(107,942,950)	(83.92)
ASET TETAP				
Tanah	30,850,343,000	30,850,343,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	126,055,680,217	126,044,594,217	11,086,000	0.01
Gedung dan Bangunan	23,423,281,969	23,423,281,969	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8,032,905,962	8,032,905,962	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	155,769,275	155,769,275	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(134,862,813,914)	(133,436,031,177)	(1,426,782,737)	1.07
JUMLAH ASET TETAP	53,655,166,509	55,070,863,246	(1,415,696,737)	(2.57)
Properti Investasi				
Properti Investasi	189,498,000	189,498,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(18,949,800)	(15,159,840)	(3,789,960)	25.00
JUMLAH Properti Investasi	170,548,200	174,338,160	(3,789,960)	(2.17)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	237,928,680	237,928,680	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(237,928,680)	(237,928,680)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	53,846,393,259	55,373,822,906	(1,527,429,647)	(2.76)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	30,805,484	39,371,115	(8,565,631)	(21.76)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	30,805,484	39,371,115	(8,565,631)	(21.76)
JUMLAH KEWAJIBAN	30,805,484	39,371,115	(8,565,631)	(21.76)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	53,815,587,775	55,334,451,791	(1,518,864,016)	(2.74)
JUMLAH EKUITAS	53,815,587,775	55,334,451,791	(1,518,864,016)	(2.74)
JUMLAH EKUITAS	53,815,587,775	55,334,451,791	(1,518,864,016)	(2.74)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	53,846,393,259	55,373,822,906	(1,527,429,647)	(2.76)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

**SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON**

Tgl Data : 30/04/26 1:51 PM

Tgl Cetak : 30/04/26 4:24 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Ambon, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

null

Abubakar, S.St.Pi, M.Si

NIP 197804272003121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 30/04/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 30/04/26 4:36 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	50,776,135,766
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	778,364,570	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	18,516,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	112,159,000
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	395,775,744
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	242,392,962
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	170,240
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	9,350,095
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	29
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	14,056,097,520	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	204,264	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	949,472,400	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	301,034,400	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	19,260,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,343,834,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	130,996,401	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	765,986,340	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,292,926,000	0
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	67,225,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	558,875,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	56,960,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,378,083,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	31,977	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	74,362,110	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	19,107,984	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	211,680,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	70,464,660	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	292,780,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,840,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	19,951,484,591	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,916,434,233	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	384,892,708	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	117,520,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	593,910,367	0
3.0	521211	Belanja Bahan	89,659,056	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,763,800,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	34,098,264	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2100) MALUKU

SATUAN KERJA : (238755) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
AMBON

Tgl Data : 30/04/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 30/04/26 4:36 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,192,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	365,586,933	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	190,146,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	32,340,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,150,115,120	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120,483,750	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	298,130,840	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	107,870,178	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44,438,432	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	562
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	2,700
JUMLAH			51,554,688,598	51,554,688,598

Keterangan :

FINAL

Ambon, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

null

Abubakar, S.St.Pi, M.Si

197804272003121001